

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : SOFIA YUSRILIA

NPM : E. 1735223063

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Skripsi dan Komprehensif Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I

Pembimbing II



Suherman, Drs., M.Si
NIDN. 04-1603-6702



Irma Hermavanty, S.Pd., M.Si
NIDN: 04-1811-7901

Mengetahui/Menyetujui
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Sebelas April Sumedang
Ketua



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG**” ini, sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

STIA

SOFIA YUSRILIA

SEBELAS APRIL

SUMEDANG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG

NAMA : SOFIA YUSRILIA
NOMOR POKOK : E. 1735223063
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

200 halaman, 5 bab, 61 tabel, 4 gambar, 8 lampiran
Daftar Pustaka: 25 buku, 7 dokumen/peraturan.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. UPPKS merupakan wadah pembinaan dan pembangunan keluarga, khususnya dalam pengembangan fungsi ekonomi keluarga. UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung program KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan Program UPPKS dapat dilihat apabila implementasi Program UPPKS berjalan mengacu pada faktor implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Program UPPKS pada Bidang Keluarga Sejahtera di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi: observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan sampel/informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu sebanyak 4 orang. Sedangkan prosedur pengolahan data digunakan analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program UPPKS sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi secara efektif dan efisien, akan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu kurangnya pembinaan yang diberikan kepada kelompok UPPKS, kurangnya bantuan modal usaha kepada setiap kelompok UPPKS, kurangnya kemampuan pengurus UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran pengembangan Program UPPKS di Sumedang.

Kata kunci: Program UPPKS, Implementasi Program, DPPKB

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa ummat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG”**

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. Yuyun Hidayat, Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Sebelas April Sumedang
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. Selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Sebelas April Sumedang
4. Yth. Bapak Shofwan Hendriyawan, S.Pd, M.Pd. Selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Sebelas April Sumedang
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si. Selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Sebelas April Sumedang Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing II
6. Yth. Bapak Suherman, Drs., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

8. Yth. Seluruh Staf Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan observasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Yth. Seluruh Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
11. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil.
12. Orang-orang terdekat peneliti, sahabat karib yang selalu memberikan dukungan.
13. Semua Rekan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amiin.

Billahifisabililhaq Fastabiqul khairat, Wassalaamualaikum Wr. Wb

Sumedang, Juni 2021

Peneliti

STIA

Sofia Yusrilia

SEBELAS APRIL

SUMEDANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Fokus Permasalahan 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara 11

1. Pengertian Administrasi Negara 11

2. Ciri-ciri Administrasi Negara 12

3. Unsur-unsur Administrasi Negara 13

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara 14

5. Kaitan Administrasi Dengan Implementasi Kebijakan. 16

B. Kebijakan Publik 18

1. Pengertian Kebijakan Publik. 18

2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Publik..... 20

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik..... 22

4. Tahap-tahap Kebijakan Publik..... 23

5. Urgensi Kebijakan Publik..... 25

6. Kerangka Kerja Kebijakan Publik. 26

C. Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).....	27
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	27
2. Tahapan-tahapan Implementasi Kebijakan Publik.....	30
3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan.....	32
4. Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan.....	33
5. Dimensi Implementasi Kebijakan.....	36
6. Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Kebijakan.....	41
7. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	45
8. Tinjauan Program UPPKS.....	48
a. Dasar Pemikiran Program UPPKS.....	48
b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Program UPPKS.....	49
c. Upaya Dalam Pengembangan Program UPPKS.....	51
d. Tujuan Program UPPKS.....	52
e. Kegiatan Program UPPKS.....	53
f. Keanggotaan Program UPPKS.....	54
g. Kegiatan Pembinaan Dalam Pelaksanaan Program UPPKS.....	57
h. Akses Permodalan Dalam Pelaksanaan Program UPPKS.....	57
D. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik.....	58
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	58
2. Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	59
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	60
F. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Pertanyaan.....	62
1. Kerangka Pemikiran.....	62
2. Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian.....	65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	68
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian.....	71
1. Penentuan Sasaran.....	71
2. Informan Penelitian.....	72

C. Teknik Pengumpulan Data	73
D. Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data	74
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	77
1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang	77
2. Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang	78
3. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	98
B. Karakteristik Sasaran Penelitian.....	99
1. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	100
2. Keadaan Fasilitas Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	103
C. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	104
D. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	138
E. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala Pelaksanaan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	168

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....192

B. Saran.196

DAFTAR PUSTAKA.....198

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Kesejahteraan Keluarga Kelompok UPPKS.	4
Tabel 1.2 Jumlah Pra-S dan KS I.	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	61
Tabel 2.2 Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian.	66
Tabel 3.1 Sasaran Penelitian.	71
Tabel 3.2 Informan Penelitian.	72
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.	76
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai berdasarkan tingkatan jabatan.	101
Tabel 4.2 keadaan pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan.	102
Tabel 4.3 Keadaan pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan.	102
Tabel 4.4 keadaan pegawai berdasarkan rentang usia.	103
Tabel 4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.	104
Tabel 4.6 Reduksi hasil wawancara mengenai menyesuaikan struktur dan strategi.	107
Tabel 4.7 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai menyesuaikan struktur dan strategi.	108
Tabel 4.8 Reduksi hasil wawancara mengenai mengoperasionalkan strategi.	110
Tabel 4.9 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai mengoperasionalkan strategi.	111
Tabel 4.10 Reduksi hasil wawancara mengenai pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.	114
Tabel 4.11 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.	115
Tabel 4.12 Reduksi hasil wawancara mengenai pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.	117
Tabel 4.13 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.	118
Tabel 4.14 Reduksi hasil wawancara mengenai motivasi.	121
Tabel 4.15 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai motivasi.	122

Tabel 4.16 Reduksi hasil wawancara mengenai komunikasi organisasi.....	124
Tabel 4.17 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Komunikasi Organisasi.	125
Tabel 4.18 Reduksi hasil wawancara mengenai desain pengendalian.....	128
Tabel 4.19 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai desain pengendalian.	129
Tabel 4.20 Reduksi hasil wawancara mengenai pengendalian anggaran.	130
Tabel 4.21 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai pengendalian anggaran.....	132
Tabel 4.22 Kesimpulan Implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang.	134
Tabel 4.23 Reduksi hasil wawancara mengenai isi kebijakan.	140
Tabel 4.24 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai isi kebijakan.....	141
Tabel 4.25 Reduksi hasil wawancara mengenai manfaat kebijakan.....	143
Tabel 4.26 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai manfaat kebijakan.	144
Tabel 4.27 Reduksi hasil wawancara mengenai sumber daya.	146
Tabel 4.28 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai sumber daya.....	147
Tabel 4.29 Reduksi hasil wawancara mengenai ketidakjelasan informasi.	149
Tabel 4.30 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai ketidakjelasan informasi.....	150
Tabel 4.31 Reduksi hasil wawancara mengenai sasaran sosialisasi.	152
Tabel 4.32 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai sasaran sosialisasi.....	153
Tabel 4.33 Reduksi hasil wawancara mengenai penyelenggara program.....	155
Tabel 4.34 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai penyelenggara program.....	155
Tabel 4.35 Reduksi hasil wawancara mengenai sasaran program.	158
Tabel 4.36 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai sasaran program.....	159
Tabel 4.37 Reduksi hasil wawancara mengenai pembagian tugas yang jelas.	161
Tabel 4.38 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai pembagian tugas yang jelas.....	162
Tabel 4.39 Reduksi hasil wawancara mengenai tanggung jawab.....	163
Tabel 4.40 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai tanggung jawab.	164
Tabel 4.41 Kesimpulan Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.....	165

Tabel 4.42 Reduksi hasil wawancara mengenai kegiatan-kegiatan kebijakan program.	170
Tabel 4.43 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai kegiatan-kegiatan kebijakan program.	171
Tabel 4.44 Reduksi hasil wawancara mengenai tujuan dan sasaran kebijakan.	173
Tabel 4.45 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai tujuan dan sasaran kebijakan.	174
Tabel 4.46 Reduksi hasil wawancara mengenai koordinasi.	176
Tabel 4.47 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai koordinasi.	177
Tabel 4.48 Reduksi hasil wawancara mengenai komunikasi.	181
Tabel 4.49 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai komunikasi.	181
Tabel 4.50 Reduksi hasil wawancara mengenai kemampuan sumber daya manusia.	183
Tabel 4.51 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai kemampuan sumber daya manusia.	184
Tabel 4.52 Reduksi hasil wawancara mengenai komitmen dalam mengelola kebijakan.	186
Tabel 4.53 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai komitmen dalam mengelola kebijakan.	187
Tabel 4.54 Kesimpulan Upaya-upaya dalam Mengatasi Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	65
Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian	70
Gambar 3.2 Bagan Prosedur Pengolahan Data.....	75
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKB Kabupaten Sumedang.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Ketua STIA Sebelas April Sumedang Tentang Penetapan Mahasiswa Penusunan Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021.
2. Surat izin penelitian.
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Pedoman Dokumentasi
6. Dokumentasi Penelitian
7. Berita Acara Bimbingan
8. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan disertai kesenjangan ekonomi selalu menjadi situasi global dan bukan fenomena baru lagi untuk dikaji pada berbagai penelitian ilmiah. Persoalan kemiskinan telah menjadi prioritas yang utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Suatu negara merencanakan pembangunan perekonomian diproyeksikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Masyarakat tradisional dengan kondisi tertinggal, memerlukan pengembangan diri menuju ke arah lebih baik dan maju untuk memperoleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang semakin layak.

Masalah kemiskinan yang membutuhkan penanganan serius dan sesegera mungkin dari pemerintah ini, juga menjadi fenomena sosial kemasyarakatan di berbagai daerah kabupaten/ kota. Melalui pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah bersinergi untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka mengentaskan kemiskinan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun dibutuhkan kerja sama, komitmen dan kontribusi seluruh pihak untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Program-program kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang belum sepenuhnya berhasil menghapuskan permasalahan kemiskinan hingga

benar-benar tuntas. Meskipun demikian, pemerintah terus-menerus berupaya melalui berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam proses mengurangi angka kemiskinan ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 bagian (f) menyatakan bahwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kependudukan juga menyadari pentingnya keberadaan usaha mikro yang dilakukan oleh keluarga Indonesia.

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), yaitu:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
2. Meningkatkan Kualitas hidup manusia.

Dari kedua agenda prioritas Nawacita di atas, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, telah membuka kesempatan cukup luas bagi daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Melalui kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga bertanggungjawab pada pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I melalui upaya kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dimaksud adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha yang dinamakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program UPPKS merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan tanpa kondisi ekonomi yang baik, tidak akan dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

UPPKS merupakan wadah pembinaan dan pembangunan keluarga, khususnya dalam pengembangan fungsi ekonomi keluarga. Melalui kegiatan UPPKS difasilitasi minat kewirausahaan dan pengkoordinasian usaha ekonomi produktif. UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung program KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga

yang termasuk tingkat pendapatannya rendah. Dengan suatu ukuran tertentu suatu keluarga dapat dinilai termasuk golongan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. misalnya dilihat dari Kondisi rumah, jumlah anak, serta keikutsertaan dalam ber KB. Keluarga ini sangat rentan terhadap guncangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraannya di waktu- waktu yang akan datang. Adapun data tentang jumlah keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I di kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kesejahteraan Keluarga Kelompok UPPKS

Tahun	Jumlah Kelompok UPPKS		Keluarga Yang Menjadi Kel UPPKS		Status KB Anggota Kel UPPKS		Status KB Anggota Kel UPPKS Keluarga Pra-S dan KS I	
	Ada	Lapor	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-S dan KS I	PUS	KB	PUS	KB
2018	276	276	4.501	2.148	3.471	3.270	1.824	1.312
2019	276	276	4.138	1.551	2.997	2.734	1.242	1.145
2020	286	286	4.243	1.750	3.002	2.783	1.211	1.104

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang 2020

Dilihat dari data di atas, Tahun 2020 jumlah anggota UPPKS lebih banyak daripada Tahun 2018 dan 2019. Semakin tinggi jumlah keluarga yang turutserta dalam kelompok UPPKS semakin tinggi juga jumlah keluarga pra KS dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS. Oleh karena itu, dapat dikelompokkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Sumedang sesuai dengan tabel 1.1 di atas yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pra-S dan KS I

Tahun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-S dan KS I
2018	4.501	2.148
2019	4.138	1.551
2020	4.243	1.750

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dilihat dari tahun 2018-2020, jumlah tertinggi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terjadi pada tahun 2018 yaitu 2.148 keluarga dari jumlah total 4.501 keluarga. Dan Kembali meningkat pada tahun 2020 sebanyak 1.750 keluarga.

Pihak pemerintah, dalam hal ini BKKBN yang bekerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten/kota untuk mencanangkan adanya kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang tersebar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia agar setiap daerah bisa menjalankan kelompok UPPKS melalui pengelolaan serta pembinaan, sehingga kegiatan UPPKS ini dapat berkembang sesuai dengan harapan. salah satu daerah yang mencanangkan program UPPKS yaitu Kabupaten Sumedang.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), sudah menjalankan program UPPKS di berbagai daerah. Adanya program UPPKS ini, seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama mensejahterakan daerah dengan menciptakan sebuah wadah bagi kelompok-kelompok usaha. Hal ini juga setiap kelompok

usaha diharapkan mampu berperan aktif dan turut serta pada program UPPKS tersebut.

Untuk mengembangkan kelompok UPPKS ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang dimotori oleh BKKBN. Berbagai strategi digunakan para pengusaha UPPKS untuk meningkatkan pemasaran produknya, akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh para kelompok tersebut, seperti kendala pendamping baik menyangkut pengetahuan maupun dana operasional. Padahal sudah selayaknya kegiatan UPPKS dilakukan dengan pendampingan yang berkesinambungan.

Keberhasilan Program UPPKS salah satunya dapat dilihat dari seberapa efektif program UPPKS bisa berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya suatu program dikatakan berjalan dengan efektif apabila rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan program atau dengan kata lain dapat diukur melalui perbandingan output atau hasil pelaksanaan program dengan rencana serta tujuan dari program tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) mengenai program UPPKS belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena menurunnya aktivitas dan kualitas kegiatan kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya pengimplementasian program UPPKS di Kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengurus UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan, manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Hal ini dilihat dari, kurangnya pengetahuan dalam mengolah bahan-bahan yang ada disekitar sehingga mereka kesusahan dalam membuat produk yang berkualitas sehingga mereka hanya bisa membuat produk yang sama dengan pedagang lain.
2. Kurang optimalnya Pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara berkelanjutan, sehingga Kelompok UPPKS belum terampil dalam menyesuaikan bidang usahanya dengan potensi daerah. Hal ini dapat dilihat pada saat pemberian pembinaan atau materi kepada kelompok, pihak instansi hanya memberikan substansi materi yang berkuat pada pelaporan dan pembukuan keuangan yang bersifat administratif saja.
3. Adanya kesulitan dalam perbantuan modal usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok UPPKS. Hal ini dilihat dari sulitnya proses pengajuan modal kepada pihak tertentu karena Salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu setiap kelompok UPPKS harus memiliki AD/ART dan berbadan hukum.

Berdasarkan pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG”**

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka pernyataan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut: “Bagaimanakah Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?”

Dari fokus permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa kegunaan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti dalam menghadapi masalah yang ada. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi berbagai pihak terkait, diantaranya:

- 1) Bagi Dinas, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memecahkan masalah berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

- 2) Bagi Lembaga, untuk memberikan Sumbangan pemikiran dan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif sebagai solusi bijak terhadap transformasi keilmuan yang dapat di aplikasikan Lingkungan STIA Sebelas April Sumedang.
- 3) Bagi Peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti dalam menghadapi masalah yang ada terkait Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Sumedang serta dapat dijadikan sumber kepustakaan terutama oleh para mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Dimensi administrasi negara merupakan sesuatu yang kompleks dan mempunyai kekayaan perspektif yang pada dasarnya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nigro (dalam Islamy, 2000: 1) mengemukakan pendapatnya bahwa “Administrasi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan negara dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik”.

Selanjutnya Iskandar (2005:54) memberikan pengertian administrasi negara sebagai “Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha pencapaian tujuan negara”. Sebagai suatu proses politik, administrasi negara meliputi seluruh rangkaian mulia saat menentukan tujuan sampai kepada penyelenggaraan pencapaian tujuan tersebut. Proses administrasi sebagai proses politik seperti dikemukakan oleh Dimock (dalam Iskandar, 2005: 57).

Selanjutnya menurut Waldo (dalam Syafiie, 2008: 33) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi negara, sebagai berikut: “Adminsitrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau

lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, administrasi negara dibutuhkan dalam sebuah sistem pemerintahan, baik kerajaan, totaliter, sosialis, parlementer, demokrasi, dan sebagainya untuk mencapai tujuan agar para pegawai yang berada di dalamnya dapat bersifat netral dalam melayani masyarakat sebagai fungsi tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Ciri-ciri Administrasi Negara

Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (dalam Iskandar, 2012:23) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, maka tidak akan jalan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya *relative* berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legislasi dari administrasi negara tersebut.
4. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Selanjutnya Thoha (2003: 48-49) mengemukakan perbedaan administrasi negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu :

- a. Adminstrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan
- c. Administrasi negara mempunyai ukuran tidak terbatas
- d. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis
- e. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur

Berdasarkan ciri-ciri administrasi negara diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara berorientasi pada pemberian pelayanan pemerintah atau organisasi privat yang dianggap penting dan berbeda dari pelayanan yang diberikan organisasi swasta, serta pelayanan yang diberikan bersifat monopoli dan semi monopoli. Selain dari pada itu pelayanan yang diberikan oleh administrator pun harus memiliki landasan hukum berupa undang-undang ataupun peraturan serta pelayanan-pelayanan yang diberikan berorientasi pada kepentingan umum atau rakyat.

3. Unsur-unsur Administrasi Negara

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Dari beberapa aspek ditemukan adanya dua klasifikasi unsur administrasi yaitu unsur yang bersifat mutlak dan unsur yang bersifat umum.

Kemudian ada beberapa dimensi atau unsur-unsur dari administrasi menurut beberapa ahli yang harus dipahami, Thoha (2011:92) mengemukakan ada delapan unsur administrasi diantaranya:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tatausaha
8. Perwakilan atau Hubungan Masyarakat

Sedangkan Siagian (2011:93) mengemukakan bahwa unsur administrasi terdiri dari manajemen, *leadership*, pengambilan keputusan, *human relationship*,

manusia dan sarana kerja. Sedangkan menurut Sahya Anggara (2016:29) unsur administrasi terdiri dari:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan Masyarakat

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai unsur-unsur administrasi, maka Silalahi (2011:99) menyimpulkan unsur-unsur administrasi atau dimensi administrasi sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Komunikasi atau hubungan manusia

Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai unsur-unsur administrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang saling terkait. Dimana administrasi merupakan proses pengaturan atau upaya yang dilakukan didalam organisasi yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yang melakukan kerja sama guna mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dari penjelasan administrasi negara diatas, dapat dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang pengertian administrasi negara. LAN RI (2003:10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam

kehadirannya sebagai disiplin dan sistem lingkup perhatian administrasi negara tersebut meliputi:

1. Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultur, dan internasional yang berkembang dalam kehidupan negara termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang medasari nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
2. Organisasi pemerintah negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada diwilayah pemerintahan negara atau sering disebut birokrasi pemerintah. Ini terdiri dari lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
3. Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan.
4. Sumber daya aparatur negara, sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
5. Sistem dan proses kebijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara.
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara. Negara eksis pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat yang hidup pada wilayah tersebut.
7. Hukum administrasi negara, hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara. Termasuk dalam hal ini mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing lembaga serta tata cara menghasilkannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dengan terselenggara secara efisien, profodionssl, efektif, tertib dan *legitimate*.

Shafritz dan Russel (2002:17) dalam bukunya "*Itroduction Public Administration*" menggambarkan ruang lingkup administrasi negara sebagai berikut:

1. Lingkungan politik dan budaya
2. Penerapan *reiveting government*
3. Hubungan antar lembaga pemerintahan

4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Manajerialisme dan kinerja
7. Manajemen strategi disektor publik
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan
12. Auditing, accounting dan avaluasi
13. Penghargaan dan etika

Dari paparan diatas bahwa dapat disimpulkan secara sistematis pokok pengamatan dalam disiplin dan sistem administrasi negara tersebut dapat dikelompokkan atas unsur-unsur yang melekat pada sistem tersebut.

5. Kaitan Administrasi Dengan Implementasi Kebijakan

Administrasi publik (public administration) yang telah lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dibuat administrasi publik yang erat kaitannya dengan proses politik yang berkaitan dengan perumusan kebijakan negara.

Oleh karena itu menurut Kasim (dalam Iskandar, 2014: 138-139) mengemukakan bahwa:

Administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkatan implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi negara mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan administrasi yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan rumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), serta pengawasan penelitian hasil pengawasan kebijakan tersebut

(*policy evaluation*). Menurut Iskandar (2014: 142), menyatakan bahwa “administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara Perkembangan administrasi negara bersifat sangat dinamis dan selalu ditantang oleh perusahaan-perusahaan”.

Dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran administrasi negara menunjukkan alur pikir baru yang ditunjang dengan seperangkat teori sehingga melahirkan paradigma baru dalam dunia administrasi negara. Paradigma baru yang memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintah akan barang-barang *public good* tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat mengenai bagaimana hubungan antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara, yang pada prinsipnya menurut Tachyan (2006: 21), dapat dilihat dari fungsi-fungsi berikut ini:

1. Tingkat perumusan haluan negara;
Tingkat disini menunjukkan kelembagaannya sedangkan makna perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan dengan diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan (yang harus diikuti oleh pemerintah).
 - b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum;
 - c. Secara penuh memegang *political outhority*.
2. Tingkat pelaksanaan haluan Negara
Dalam pengertian administrasi negara, tingkat pelaksanaan haluan negara sering disebut sebagai tingkat administrasi.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa memang terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik serta keduanya dengan politik, karena setiap kehendak politik dapat mendesak masuk dalam kebijakan negara yang di gariskan, sedangkan pihak lain tingkat pelaksanaan kebijakn yaitu

birokrasi sebagai bagian dari administrasi publik, juga dapat mendesak aspiasinya dalam penyusunan administrasi negara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dalam Administrasi Negara yang tidak terlepas kebijakan publik terkait dengan variabel penelitian, yaitu implementasi program UPPKS sebagai suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha keluarga guna meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* (Bahasa Inggris), yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kata *policy* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh para ilmuwan masih menunjukkan adanya keanekaragaman pengertian kebijakan.

Administrasi negara dewasa ini telah mempunyai arti lebih sekedar pengertiannya yang tradisional. Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu bidang kajian yang menjadi perhatian utama dari administrasi negara adalah kebijakan publik.

Menurut Iskandar (2005:162) mengatakan bahwa :

Kebijakan publik amat penting bagi administrasi negara, karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh, untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan publik dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Menurut Nugroho (2008:54) Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan

tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas. Jadi kebijakan publik dimulai dari program, ke proyek, dan kemudian ke dalam bentuk kegiatan.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno, 2012:23) kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh

pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus.

Berdasarkan asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau suatu pilihan keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan publik mengatur baik secara langsung atau tidak langsung pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, atau pengelolaan tatanan kenegaraan dan perekonomian untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, yaitu masyarakat luas, segala lapisan penduduk dalam suatu negara.

2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Publik

Dalam proses penyusunan suatu kebijakan tentu adanya fungsi dari kebijakan tersebut. Fungsi kebijakan merupakan penjaminan ketertiban dalam suatu negara atau daerah sesuai dengan tingkat mana kebijakan dibuat. Kebijakan publik tersebut haruslah segala sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah untuk

rakyatnya. Meskipun dihasilkan dengan kerjasama beberapa lembaga negara sendiri, atau organisasi non pemerintah dimana ada hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Kebijakan publik tersebut mengandung formulasi atau tata cara dalam pelaksanaannya sehingga aturan tersebut menjadi jelas. Selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi lain dengan perilaku konsisten agar tujuan dikeluarkannya menjadi jelas.

Tujuan kebijakan publik dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Menurut Widodo (2001:190) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketertiban
Tujuan kebijakan publik yaitu menjamin ketertiban dalam negara atau dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan dibuat. Hal ini karena ada beberapa ketertiban yang tidak berjalan tanpa adanya kebijakan publik
- b. Melindungi hak-hak Masyarakat
Beberapa kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat khususnya pada hak asasi manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat memiliki hak yang sama, jika tidak ada pengaturan dan ingin bebas melaksanakan haknya tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi.
- c. Ketentraman dan Perdamaian
Tujuan semua kebijakan publik dibuat yaitu untuk ketentraman dan perdamaian masyarakat dan semua warga negara yang ada. Kebijakan publik tidak memihak satu golongan manapun.
- d. Tujuan Bidang Tertentu
Kebijakan politik dalam hal tertentu dibuat untuk tujuan tertentu misalnya ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan kebijakan ini dibuat untuk menyelamatkan ideologi pancasila yang dirasakan pemerintah ideologi pancasila sudah mulai berkurang dan tidak dipahami oleh masyarakat dan generasi muda saat ini.
- e. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yaitu dengan tujuan yang tercantum di pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Sebuah tujuan dalam kebijakan publik yaitu alat mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dalam sebuah kebijakan yaitu ingin melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Karena jika tidak adanya kebijakan atau yang mengatur aturan kepada masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Adapun fungsi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh, Widodo (2001:190), yaitu sebagai berikut:

- a. Ketertiban
Kebijakan publik ini dibuat supaya terjadinya ketertiban yang nantinya akan memperlancar pembangunan. Pembangunan diberbagai bidang bisa dilaksanakan dengan baik apabila adanya investasi.
- b. Menjamin Hak Asasi
Fungsi lain dari kebijakan publik yaitu dengan menjamin pelaksanaan hak asasi supaya setiap orang bisa terpenuhi hak asasinya.
- c. Petunjuk Program Kegiatan
Setiap mencapai tujuan tertentu ada rencana buat kegiatan dan sebuah rencana buat mencapai tujuan jangka panjang. Dengan dikeluarkannya kebijakan publik, maka masalah yang terjadi akan disesuaikan rambu kebijakan publik yang dibuat.
- d. Arahan Kepada Pelaksana
Kebijakan publik dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pengeluaran kebijakan ini jadi arahan pada pelaksana dilapangan dan kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai.
- e. Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha
Kebijakan publik berfungsi sebagai penyelenggara administrasi dan urusan tata usaha. Setiap kebijakan akan dicatat. Jadi pelaksana, tujuan dan hasilnya menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

Berdasarkan asumsi di atas, bahwa ciri-ciri kebijakan publik melihat pada kenyataan kebijakan yang dirumuskan tersebut. Selain itu kebijakan publik juga merupakan salah satu tindakan yang mengarah kepada tujuan daripada tindakan karena pada hakekatnya kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah pada tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri dengan hasil positif ataupun negative tergantung kepada pemerintah itu dalam melaksanakannya.

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap kebijakan tersebut merupakan proses yang saling terkait yang mempengaruhi satu sama lain. Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam tahap tersebut dilakukannya identifikasi persoalan (masalah) publik yang akan dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu formulasi. Setelah diformulasikan, pada tahap adopsi akan dipilih alternatif yang baik untuk dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik. Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai ketetapan, manfaat, dan efektifitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi. Diantara kelima tahap kebijakan tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan tahap keempat yakni tahap implementasi kebijakan.

5. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Wahab (dalam Suharno, 2010: 14) sebagai berikut:

Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Sedangkan menurut Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a. Alasan Ilmiah
Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
- b. Alasan professional
Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
- c. Alasan Politik
Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

6. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakannakan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis

C. Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakam aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan, karena keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dari tahap

pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain implementasi kebijakan adalah perwujudan secara nyata dari kebijakan yang telah diformulasikan agar memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

Secara umum istilah implementasi memiliki pengertian menurut ahli yaitu, menurut Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selanjutnya Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa:

The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa:

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Selanjutnya Wahab (2008:64) memberikan pengertian sebagai berikut “Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan sesuatu hal yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan dan untuk mencapai tujuan dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya hingga pemerintah yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Suatu proses implementasi kebijakan merupakan kebijakan publik

Kegiatan dari suatu kelompok aksi yang ditujukan untuk mempercepat atau memperlambat (menghambat) pelaksanaan suatu kebijakan tertentu menjadi bagian dari proses implementasi, dan bukan dari implementasi itu sendiri.

2. Tahapan-tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan (Sugandi 2011:89), yaitu:

1. Tahap Interpretasi
Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang berbentuk undang-undang ataupun perda.
2. Tahap Pengorganisasian
Tahapan ini adalah penentu pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat di definisikan sebagai lembaga, instansi pemerintah, LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Kemudian penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (Swasta/masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Karena peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan.
3. Tahap Implikasi
Pada tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sesuai dengan Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2008:36)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

- a. Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 2. Menentukan standar pelaksanaan.
 3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metodel.
- c. Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan:
1. Menentukan jadwal
 2. Melakukan pemantauan
 3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Wahab (2008 :64) memberikan pengertian sebagai berikut “Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan,yang biasanya dalam bentuk undang-undang,peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemetasi kebijakan negara.

Ada beberapa elemen penting dalam iimplementasi kebjakan publik yang dikemukakan oleh Islamy (2003:20), yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk berdayanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluuh anggota masyarakat.

3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Faktor penentu implelementasi kebijakan menurut Agustino (2017:156-162) sebagai berikut:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimet. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.
- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan
Bermain dalam ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.
- c. Ada atau tidaknya sanksi hukum
Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.
- d. Kepentingan pribadi atau kelompok
Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.
- e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada suatu daerah.
- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak

bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.

- g. Wujudnya kepatuhan selektif
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakn lain.
- h. Waktu
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.
- i. Sosialisasi
Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang di formulaskannya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.
- j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi
Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan.

4. Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah diungkap pada bagian sebelumnya, perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya bersifat tersentralisasi. Atau dalam kata lain, pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrator, atau birokrat disemua tingkatan terutama pada tingkat bawah.

Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan memperkenalkan pendekatan *bottom-up* atau dalam istilah Lester & Stewar Jr. (2000:108) dinamakan “*The market approach*” atau (pendekatan pasar) sebagai respon atas pendekatan *top-down*. Para penggagas pendekatan ini menolak gagasan bahwa kebijakan ditentukan ditingkat pusat dan pelaksana harus tetap berpegang pada tujuan ini seketat mungkin. Mereka berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai dari bawah yang mengenal dan memahami konteks masalah yang dirasakan oleh mereka.

Generasi ketiga memperkenalkan pendekatan *hibrid* atau pendekatan *campyran* (antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*). Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Elmore (Pulzl & Treib 2007:126) seorang simpatisan pendekatan *top-down* yang merasa gundah dengan kelemahan dua pendekatan yang ada. Oleh sebab itu, ia menggabungkan *forward-mapping* dengan *backward-mapping* yang intinya adalah para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan (*forward-mapping*) dan juga harus mengetahui struktur insentif pelaksana dan kelompok sasaran (*backward-mapping*).

Dalam Agustino (2017:133-154), setelah membahas mengenai ketiga generasi pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, adapun model-model implementasi kebijakan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan model Donald van Metter dan Carl van Horn, model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implemenstation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan

publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

2. Implementasi kebijakan model George C. Edward III, model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Menurut Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i). Komunikasi; (ii). Sumberdaya; (iii). Disposisi; dan (iv). Struktur birokrasi.
3. Implementasi kebijakan model Marille S. Grindle, pendekatannya dikenal dengan nama implemenstation as A political and administrative process. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).
4. Implementasi kebijakan model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier, model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Mazmanian & Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *a frame work for policy implementation analysis*. Kedua ahli kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.
5. Implementasi kebijakan model Thomas R. Dye, model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah 'Model Implementasi Interaktif'. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan.
6. Implementasi kebijakan model Charles O. Jones, dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:
 - a Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
 - b Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
 - c Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*). Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*)

merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang telah lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Betumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

5. Dimensi Implementasi Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan akan mencapai sukses sesuai dengan apa yang diharapkan apabila memenuhi faktor-faktor implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edwards III (2003:11-14) :, dalam Implementasi Kebijakan Publik seperti ditransformasikan oleh Tangkilisan. Untuk implementasi kebijakan yang berhasil, perlu mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, diantaranya:

a. Implementasi strategi (pra implementasi)

Implementasi merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Dengan keterampilan intuitif dan analistik yang baik, motivasi, dan

kepemimpinan khusus serta mampu melakukan banyak koordinasi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Menurut Wheelen dan Hunger (2009: 135) “Implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program dan anggaran”

Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Peletakkan strategi pada perencanaan ini meliputi tiga aspek, yaitu program, anggaran, dan prosedur. Program, meliputi rencana penyelesaian mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Anggaran, meliputi dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program implementasi yang direncanakan oleh manajemen.

Prosedur, mengenai urutan langkah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Adanya implementasi strategi ini diperlukan untuk mengurutkan tahap dalam pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan oleh manajemen agar hasil yang di dapat lebih baik dan sesuai dengan rencana organisasi. Adapun indikator untuk implementasi strategi yaitu (a) menyesuaikan struktur dengan strategi; (b) mengoperasionalkan strategi.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Amirullah dan Budiyo (2004: 165) “Pengorganisasian merupakan proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melakukan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan”. Hal ini menyangkut pembagian kerja untuk diselesaikan dan mengkoordinasikan dalam proses manajemen.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua dan dilakukan secara langsung dari dasar yang telah dibuat oleh perencanaan yang baik. Sekali rencana-rencana dibuat, tugas manajer adalah untuk mengatur sumber-sumber daya sesuai dengan tujuan yang tepat. Saat semua dapat terlaksana dengan baik, pengorganisasian membagi siapa yang harus melakukannya, mengidentifikasi siapa yang harus memerintah dan mengadakan hubungan-hubungan perkantoran untuk komunikasi.

Proses pengorganisasian terdiri dari lima langkah yang terjadi secara kontinue (terus-menerus/berkelanjutan) dimana dalam pelaksanaannya proses ini perlu dilakukan peyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas organisasi. Tahapan atau proses pengorganisasian antara lain sebagai berikut:

1. Merefleksikan tujuan dan rencana
2. Menetapkan tugas-tugas utama, yakni merinci semua pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi serta misinya.
3. Membagi tugas-tugas utama, yaitu membagi beban kerja utama kedalam aktivitas-aktivitas yang secara logis serta bisa memadai untuk dilaksanakan oleh seseorang atau dalam suatu tim.
4. Mengalokasikan sumber daya serta arahan untuk tugas-tugas dimana pada tahap ini dalam mengkombinasikan antara pekerjaan secara logis dan efisien serta menetapkan suatu mekanisme untuk mengorganisasikan antar pekerjaan.


5. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang sudah dilakukan.

Adapun indikator untuk pengorganisasian yaitu (a) pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; (b) pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi).

c. Penggerakkan dan kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan yang diembannya memiliki fungsi strategis yang menentukan kinerja organisasi. Pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara efektif, dapat menggerakkan orang/personil kearah tujuan yang dicita-citakan, akan menjadi panutan dan teladan. Sebaliknya pemimpin yang keberadaanya hanya sebagai figur dan tidak memiliki pengaruh serta kemampuan kepemimpinannya, akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi lambat, karena ia tidak memiliki kapabilitas dan kecakapan untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Menurut Suwatno dan Juni (2016: 140), menyatakan:

 Kepemimpinan atau *leadership* termasuk kelompok ilmu terapan atau *applied sciences* dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusan-rumusannya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai langkah awal untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek kepemimpinan dan permasalahannya, perlu dipahami terlebih dahulu makna atau pengertian dari kepemimpinan melalui berbagai macam perspektif.

Menurut George R Terry (Thoha 2015: 259), merumuskan “Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi”.

Ciri-ciri kepemimpinan yang ideal, yaitu sebagai berikut:

1. Keterampilan mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah

sikap dan perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.

2. Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berfikir, cara bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang.
3. Keterampilan berkomunikasi secara efektif, fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain: a). Fungsi motivasi; b). Fungsi ekspresi emosi; c). Fungsi penyampaian informasi; d). Fungsi pengawasan.

Adapun indikator untuk penggerakkan dan kepemimpinan yaitu (a) motivasi; (b) komunikasi organisasi.

d. Pengendalian

Pengertian pengendalian sebenarnya berkisar pada kegiatan memberikan pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan pengevaluasian keseluruhan kegiatan manajemen agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai secara tepat.

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Amirullah dan Budiyo, 2004: 298) mengartikan:

Pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu. Kriteria yang menentukan efektivitas sebuah sistem pengendalian adalah seberapa baik sistem itu membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi mereka, semakin baiklah sistem pengendalian itu.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Amirullah dan Budiyo, 2004: 298) mendefinisikan:

Pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dikatakannya, pengendalian membantu menejer memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Sedangkan bagian terpenting dari proses pengendalian itu sendiri adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Sedangkan menurut Mokler (dalam Amirullah dan Budiyono, 2004: 298)

memberikan pengertian:

Pengendalian yang menekankan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah. Pengendalian didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Adapun indikator untuk pengendalian yaitu (a) desain pengendalian; (b) pengendalian anggaran/keuangan.

6. Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa hambatan yang harus diperhatikan untuk mengimplemntasikan kebijakan, pengaruh tersebut dapat menjadi hambatan maupun faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu:

a. Isi kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi, sunggono (1994:145) mengemukakan isi kebijakan merupakan salah satu hal yang menjadi acuan dalam berjalannya implementasi kebijakan. Namun dalam implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan isi kebijakan memiliki beberapa permasalahan diantaranya, yaitu:

1. implemetasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. kebijakan yang akan diimplementasikan akan dapat juga menunjukkan kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
4. penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan menjadi suatu hambatan untuk melaksanakan implementasi kebijakan oleh pelaku kebijakan.

b. Informasi

Impelementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Adapun beberapa pengertian informasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli, diantaranya:

Menurut Rommey dan Steinbart (2009:20) mengemukakan bahwa informasi adalah data yang sudah diproses dan di organisasikan untuk

memberikan arti bagi pengguna. Senada dengan Gelinas & Dull (2012:18) mengemukakan bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk formulir yang berguna dalam kegiatan pembuatan keputusan.

Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan berhubungan dengan informasi pemerintah, yakni menetapkan aturan dimana penyedia informasi pribadi dan media beroperasi. Dari penjelasan ini bahwa informasi memiliki beberapa tipe yaitu informasi sebagai sumber daya, komoditas, persepsi pola, wadah berbagai kemungkinan yang ada, agen dan kekuatan konstitusi masyarakat. Masing-masing tipe ini memiliki kegunaan dalam analisis kebijakan. Berbagai tipe ini berguna untuk berbagai tahap menganalisa bagian tertentu dari kebijakan pada saat pemberian informasi.

Dalam implementasi kebijakan informasi memiliki dua bentuk informasi yang dikemukakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:158-159) yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
2. Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

c. Dukungan

Dalam mengimplementasikan suatu program tentu harus adanya dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan, diantaranya:

Menurut Chaplin (2006:17) mengemukakan bahwa “dukungan adalah pemberian dorongan, motivasi atau semangat serta nasehat kepada orang lain yang sedang di dalam situasi membuat keputusan”.

Sedangkan menurut Kuntjoro (2002:) mengemukakan bahwa dukungan adalah:

Segala bentuk informasi verbal ataupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku di berikan oleh sekelompok orang yang dekat dan akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya. Atau dalam bentuk lain juga bias berupa kehadiran ataupun segala sesuatu hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Contoh bentuk dukungan adalah kepedulian, keberadaan, kesediaan, serta sikap menghargai.

Dari pendapat kedua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan merupakan bentuk dorongan, semangat, kepedulian, kesediaan didalam suatu lingkungan, sehingga segala sesuatu yang diberikan memberikan keuntungan yang berpengaruh pada tingkah laku penerima. Sehingga proses pelaksanaan bias berjalan dengan baik.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Menurut Sunggono (1994:149) mengemukakan bahwa “pembagian tugas merupakan keahlian yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan”. Oleh karena itu pembagian potensi merupakan Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik menurut Sunggono (1994:144-145), diantaranya:

1. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderung orang bertindak dengan jala melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

7. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan Perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana lainnya.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Aidan Everning (dalam Pasolong, 2010:59) yaitu sebagai berikut:

1. Logika Yang Digunakan Oleh Suatu Kebijakan

Dalam suatu kebijakan tentu harus adanya pengetahuan berfikir atau logika berfikir dari orang tersebut dalam menyusun kebijakan. Dalam hal ini, pemegang suatu kebijakan atau pemerintah bisa memperkirakan rangkaian hasil yang dihasilkan oleh sebuah kebijakan dalam rangka mencapai dampak yang diharapkan.

Logika yang digunakan dalam suatu kebijakan memang sangat penting untuk diperhatikan dalam setiap pembuatan kebijakan. Tahap demi tahap dari hasil yang terjadi harus dapat diperkirakan sehingga bisa mengantisipasi dampak negative. Jika kegagalan bisa dilihat sejak awal Ketika proses mendesain kebijakan, maka kebijakan itu sesungguhnya tidak perlu dikeluarkan atau harus di revisi. Oleh karena itu, logika dalam suatu kebijakan bisa dijadikan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam Menyusun suatu

kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan yang menggunakannya.

2. Hakikat Kerjasama Yang Dibutuhkan

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik, Kerjasama antara pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan menjadi poin penting agar lebih memaksimalkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam suatu kebijakan tersebut. Dengan adanya Kerjasama yang dilakukan maka suatu kebijakan akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaannya pun bisa lebih optimal.

Menurut Grindle (dalam Nirmala, 2015:26) menyatakan bahwa, Kerjasama yang baik dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Kepentingan dipengaruhi oleh program yang dibuat. Pencapaian efisiensi dan efektivitas dari setiap program yang dilaksanakan akan dipermudah jika mengetahui kepentingan kelompok sasaran.
- b) Bentuk manfaat yang diperoleh. Dukungan dan Kerjasama dari kelompok sasaran atau masyarakat akan lebih mudah didapatkan jika implementasi kebijakan memiliki dampak kolektif untuk banyak orang.
- c) Skala perubahan yang diharapkan. Skala yang jelas terhadap perubahan yang diharapkan.
- d) Potensi pengambilan kebijakan. Semakin luasnya posisi pengambil kebijakan akan semakin sulit pula implementasinya. Oleh karena itu untuk mengambil suatu kebijakan Kerjasama antar pihak dalam keberhasilan suatu program sangat diperlukan.
- e) Pelaksanaan program. Adanya pelaksanaan suatu kebijakan yang kompeten sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan atau program demi keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan asumsi di atas, untuk mengembangkan kebijakan secara bijaksana, pihak pemerintah perlu mencari solusi atas setiap persoalan yang ada salah satunya yaitu menjalin Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak atau dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Kerjasama yang melibatkan banyak pihak memiliki peranan penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas suatu kebijakan atau program mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri namun perlu adanya keterlibatan *stakeholder* dan Kerjasama dengan berbagai pihak.

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset utama pada sebuah organisasi atau perusahaan. Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program memegang peranan yang sangat penting karena dengan banyaknya SDM yang terlibat dalam suatu kebijakan akan mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga keberhasilan suatu kebijakan atau program tersebut bisa lebih optimal.

8. Tinjauan Program (UPPKS)

a. Dasar Pemikiran Program (UPPKS)

UPPKS menurut direktorat pemberdayaan ekonomi keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera merupakan suatu program dari BKKBN yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama keluarga miskin yang

kegiatannya memberikan pelatihan dan pendanaan bagi ibu-ibu rumah tangga agar dapat membuka lapangan usaha dengan cara memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia di lingkungan tempat tinggalnya guna diolah dan dikelola agar dapat dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

Untuk meningkatkan Pendapatan keluarga Sejahtera dengan cakupan yang lebih luas, antara lain dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan keluarga lain yang peduli menjadi anggota kelompok UPPKS. Kesungguhan kelompok dalam mengelola usaha ekonomi produktif menumbuhkan keyakinan dan kepedulian pemerintah, sehingga sejumlah pengusaha swasta dan BUMN memberikan dukungan dalam bentuk bantuan modal usaha yang harus dikembalikan dengan bunga ringan yang dikelola oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM).

Landasan hukum mengenai pengelolaan UPPKS yang terakhir adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Bantuan Modal Usaha Kelompok UPPKS. Serangkaian legal aspek yang telah dikeluarkan tersebut sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam mengelola Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Secara empiris pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UPPKS dapat dijelaskan dari serangkaian hasil-hasil penelitian sebagai berikut: Penelitian Evaluasi Kegiatan UPPKS, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP Yogyakarta dan BKKBN, tahun 1994. Hasil Penelitian menunjukkan peningkatan ketrampilan khusus (teknis produktif) diperlukan

anggota, pelatihan ketrampilan administrasi diperlukan bagi pengurus kelompok UPPKS. Variabel kemudahan bahan baku, pemasaran, kelengkapan pengurus, dan intensitas pembinaan merupakan variable yang sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan UPPKS.

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Program UPPKS

Adapun dasar hukum dalam penyelenggaraan kelompok Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaga Negara Tahun 1994 Nomor 30)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen.
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK.010/B5/2007 tentang visi misi dan grand strategi BKKBN.
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 367/HK.010/B5/2008 tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi program Keluarga Berencana Nasional.
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK.010/B5/2009 tentang pedoman pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 233/HK.010/F3/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelola program aplikasi database kelompok UPPKS online.

c. Upaya dalam Pengembangan Program UPPKS

Meskipun bentuk usaha yang dikelola keluarga pra KS dan KS I umumnya skala kecil (mikro), namun bagi mereka masalah utama tetap pada persoalan permodalan (keterbatasan terhadap modal). Oleh karena itu, penanganannya dengan pemberian permodalan berupa kredit, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai embrio usaha ekonomi produktif. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN dalam rangka mengembangkan kelompok UPPKS, antara lain melalui:

1. Pemberian bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan kredit lainnya.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan.
3. Membangun kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna, dan pemasaran.
4. Perluasan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini dengan berbagai pihak.
5. Pembinaan produksi agar kelompok ini menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan permintaan pasar. Kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada kelompok dengan komprehensif untuk pengembangan usaha ekonomi produktif ditujukan untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Bantuan permodalan Kukesra diberikan kepada Keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang bertempat tinggal di luar Desa Tertinggal dan telah menjadi anggota Kelompok UPPKS. Keluarga-keluarga tersebut diberikan bantuan usaha di sektor produktif, dengan harapan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat gemar menabung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

d. Tujuan Program UPPKS

Tujuan dibentuknya UPPKS adalah untuk mempermudah melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif, disamping itu juga akan mempermudah berbagai pihak untuk melakukan pembinaan terhadap usaha ataupun pengembangan tenaga kerja terampil dan inovatif sehingga usaha yang dikembangkan berdaya saing. Selain itu, tujuan secara khusus kegiatan UPPKS yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dinamika kelompok, dengan mendorong anggota untuk dapat meningkatkan dan memantapkan kesertaan dalam ber KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alatkontrasepsi yang efektif.
2. Mengisi kegiatan ekonomi produktif kepada kelompok peserta KB, sehinggadapat menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut.
3. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi (khususnya para perempuan peserta KB) sehingga perannya meningkat baik dalam keluarga maupun masyarakat.
4. Mendorong kemandirian kelompok dalam peningkatan ekonomi keluargadengan melakukan usaha-usaha produktif.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok dalam organisasi maupun pengelolaan administrasi keuangan.
6. Mendorong kelompok dalam memperoleh bantuan permodalan.

e. Kegiatan Program UPPKS

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan wadah pembinaan dan pembangunan keluarga, khususnya dalam pengembangan

fungsi ekonomi keluarga. Melalui kegiatan UPPKS difasilitasi minat kewirausahaan dan pengkoordinasian usaha ekonomi produktif.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan dimotori oleh BKKBN untuk mengembangkan kelompok UPPKS ini (BKKBN, 2007), antara lain:

1. Memberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, pembinaan kemitraan baik dalam hal permodalan, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran.
3. Pembinaan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok dengan berbagai pihak.
4. Pembinaan produksi agar kelompok UPPKS menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar.

f. Keanggotaan Program UPPKS

Keanggotaan kelompok UPPKS terdiri atas masyarakat pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III+ baik yang belum, sedang maupun purna peserta KB, guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (BKKBN, 1995). Anggota UPPKS mayoritas adalah kaum perempuan, peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. anggota lainnya dapat pula dari kalangan

keluarga yang memiliki tahapan kesejahteraan yang lebih baik dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki minat dalam pengembangan usaha kelompok.

Dalam UPPKS, harus dibentuk pengurus. Karena para pengurus inilah elemen dinamisator. Hanya dengan UPPKS yang dinamis, penuh prakarsa, berdedikasi dan kaya gagasan, suatu pilihan kegiatan ekonomi produktif akan berpengharapan untuk maju dan berkembang. Unsur dalam pengurus UPPKS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, bila perlu dapat dibantu dengan dibentuk seksi- seksi. Adapun tugas pokok dari pengurus UPPKS, yaitu sebagai berikut:

A. Ketua

Fungsi dan tugasnya adalah:

1. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan atas keberhasilan UPPKS.
2. Menyusun rencana kegiatan bersama anggota pengurus.
3. Membagi tugas pengurus dan anggota.
4. Mengendalikan kegiatan administrasi.
5. Mendorong dan memberi contoh kepada anggota untuk selalu memenuhi peraturan.
6. Menghubungi mitra usaha.
7. Menghubungi petugas untuk pembinaan anggota.

B. Sekretaris

Fungsi dan tugasnya adalah:

1. Menyelenggarakan segala kegiatan surat menyurat.

2. Menerima surat masuk dan menyampaikan kepada ketua.
3. Menyiapkan jawaban surat dan mengirimkannya setelah disetujui ketua.
4. Menyiapkan surat edaran, undangan, pertemuan dan sebagainya.
5. Menyiapkan acara pertemuan sesuai jadwal.
6. Menyampaikan hal- hal yang dipermasalahkan kepada ketua.
7. Mengisi dan mengirimkan laporan.
8. Menyimpan arsip- arsip dan dokumen penting.
9. Mencatat dan merangkum hasil rapat dan menginformasikannya kepada anggota.

C. Bendahara

Fungsi dan tugasnya adalah:

1. Menyediakan pelayanan keuangan.
 2. Mencatat keluar masuknya uang.
 3. Menyetorkan uang tunai ke bank.
 4. Membuat bukti pengeluaran dan pemasukan uang.
 5. Mencatat kekayaan.
 6. Membuat laporan keuangan.
 7. Memberikan pelayanan simpan pinjam untuk anggota.
 8. Menagih pengembalian pinjaman pada waktunya.
- D. Seksi Seksi dibentuk dengan tujuan agar segala kegiatan usaha ekonomi produktif dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Dengan adanya seksi- seksi tersebut diharapkan terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam UPPKS sehingga

pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Seksi tak harus dibentuk, seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan. dalam mencapai tujuannya serta mempertimbangkan potensi kemampuan anggota yang akan ditempatkan pada posisi seksi- seksi itu.

1. Seksi usaha bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha mulai dari penilaian kelayakan usaha dan perencanaan, sampai dengan pelaksanaan usaha.
2. Seksi produksi bertanggung jawab dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan.
3. Seksi pemasaran bertanggung jawab dalam memasarkan hasil produksi.
4. Seksi kemitraan bertanggung jawab dalam mencari pihak yang dapat membantu kelancaran usaha

g. Kegiatan Pembinaan Dalam Pelaksanaan Program UPPKS

Dalam pelaksanaan kelompok UPPKS, terdapat 6 (enam) agenda pembinaan yang dapat dilakukan oleh fasilitator menurut pedoman (BKKBN, 2010, hal. 95), yakni sebagai berikut:

1. Pembinaan organisasi.
2. Pembinaan permodalan
3. Pembinaan usaha ekonomi produktif
4. Pembinaan administrasi dan pembukuan
5. Pembinaan pemasaran.
6. Pembinaan kesertaan ber-KB.

h. Akses Permodalan dalam Pelaksanaan Program UPPKS

Program pemberian bantuan pinjaman bagi pengusaha kecil telah dipersiapkan oleh beberapa instansi maupun pihak perbankan sendiri. Hal ini dapat dilihat antara lain kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyak peluang kelompok UPPKS untuk mengakses sumber-sumber pinjaman modal. Hanya saja dari pihak lembaga keuangannya yang baru setengah hati untuk membantu memberikan pinjaman modal bagi kelompok UPPKS yang notabene usahanya ada yang baru belajar dan juga modalnya kecil.

Untuk mekanisme pengajuan bantuan pinjaman modal, pada dasarnya hampir sama semua. Akan tetapi ada juga persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha ditentukan sendiri oleh lembaga Keuangan yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak institusi yang menawarkan pinjaman untuk modal di tingkat kecamatan. Namun demikian pendekatan harus dilakukan melalui strategi yang tepat sehingga bantuan pinjaman modal usaha dapat diperoleh dengan bunga rendah tanpa agunan demi terselenggaranya kegiatan usaha bagi kelompok UPPKS. Hal ini tergantung dari kejelian petugas dari BKKBN untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan untuk mengenalkan atau menginformasikan keberadaan kelompok-kelompok UPPKS.

D. Evaluasi Impelementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh

mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Adapun pandangan ahli yang mengatakan mengenai evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Menurut Dunn (2003:608) mengemukakan bahwa:

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Selanjutnya Scriven (dalam Dunn 2003:607) mengemukakan bahwa:

Pengevaluasi harus mengevaluasi merupakan penilaian itu sendiri tetapi sekaligus juga merupakan tautology, karena itu lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting.

Selanjutnya Effendi berpendapat (dalam Dwidjowidjoto 2006:62) bahwa:

Tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.

Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memilih

variabel-variabel yang dapat diubah, atau *actionable* variable-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

2. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Selanjutnya Dunn (2003:610) mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*): suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.
2. Efisiensi (*efficiency*): suatu kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut membuahkan hasil yang rasio efektivitas-biaya lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi *marginal*)
3. Kecukupan (*Adequacy*): Kriteria yang digunakan untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan melihat seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan.
4. Perataan (*Equity*): Suatu kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif direkomendasikan tersebut menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap risorsis yang ada dalam masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan proposal.

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Vera Ari Kurniasih “Implementasi Pelaksanaan Program Uppks Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Oleh Badan PP, PA Dan KB Kabupaten Karanganyar” Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010)	Lokus penelitian di Badan PP, PA Dan KB Kabupaten Karanganyar	1. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu fokus penelitian tentang UPPKS. 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi, dokumentasi 3. Metode penelitian kualitatif	Dapat diketahui bahwa jumlah anggota UPPKS se Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 80% dari jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal itu membuktikan masih banyak penduduk yang masih rendah pendapatannya/ miskin di Kabupaten Karanganyar. Sehingga perlu diberdayakan lagi program UPPKS supaya pendapatan masyarakat miskin menjadi bertambah.
2.	Mardiyono “Strategi Bauran Pemasaran Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011	1. Pembahasan yang di jelaskan tentang strategi pemasaran tpada kelompok UPPKS 2. Lokus penelitian yang di teliti yaitu di Kabupaten Kulon Progo	1. Studi kasus atau fokus permasalahan yang di teliti yaitu tentang UPPKS 2. Metode penelitian kualitatif	Berdasarkan kesimpulan mengenai penelitian tersebut yaitu, Kelompok UPPKS kurang menciptakan produk yang berbeda atau unik dari pedagang lain, Harga-harga dari produk di kelompok UPPKS cenderung lebih mahal dari pedagang lain, serta Promosi yang dilakukan kelompok UPPKS tidak menggunakan media internet, surat kabar.
3	Noni Daeni “Implementasi	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi

<p>kebijakan program pengembangan budaya baca dalam pengelolaan perpustakaan di kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten sumedang”</p> <p>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang 2019</p>	<p>teliti yaitu lokus penelitian yang berbeda dan perbedaan dari studi kasus program yang berbeda</p>	<p>yang akan di teliti yaitu sama variabel tentang implementasi program.</p>	<p>program pengembangan budaya baca dalam pengelolaan perpustakaan Kabupaten Sumedang masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari beberapa hambatan salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya budaya baca, kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai, seperti buku-bukunya yang kurang lengkap.</p>
---	---	--	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tujuan dari program KB, terutama ditujukan untuk keluarga pra KS dan KS I. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu melalui pembentukan kelompok UPPKS. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Sosial (UPPKS) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang layak untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian program yang di canangkan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN sudah berjalan dengan efektif atau belum efektif.

Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang faktual bagi pemerintah daerah, khususnya instansi terkait yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk

pengambilan kebijakan peningkatan ekonomi keluarga melalui pelaksanaan program UPPKS.

F. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Pertanyaan

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variable, maka dibuatlah kerangka berpikir. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan.

Program UPPKS merupakan Kegiatan yang dilakukan melalui pembentukan kelompok wirausaha, untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. kegiatan ini dilakukan oleh BKKBN, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga perseta KB agar lebih sejahtera hidupnya. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan UPPKS ini diharapkan dapat berfungsi menggerakkan roda ekonomi keluarga. (BKKBN, 2005).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan melalui pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 Ayat 1 bagian (f). Upaya

yang dilakukan seperti pemberian bantuan langsung tunai, pemberian bimbingan usaha, dan pemberdayaan keluarga.

Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:149) adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ini dapat dikatakan berhasil, apabila implementasi Program UPPKS berjalan mengacu pada faktor implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004:162-163) Sebagai berikut.:

1. Implementasi strategi (pra implementasi)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penggerakkan dan kepemimpinan
4. Pengendalian

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan, Menurut Sunggono (1994: 149-153):

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

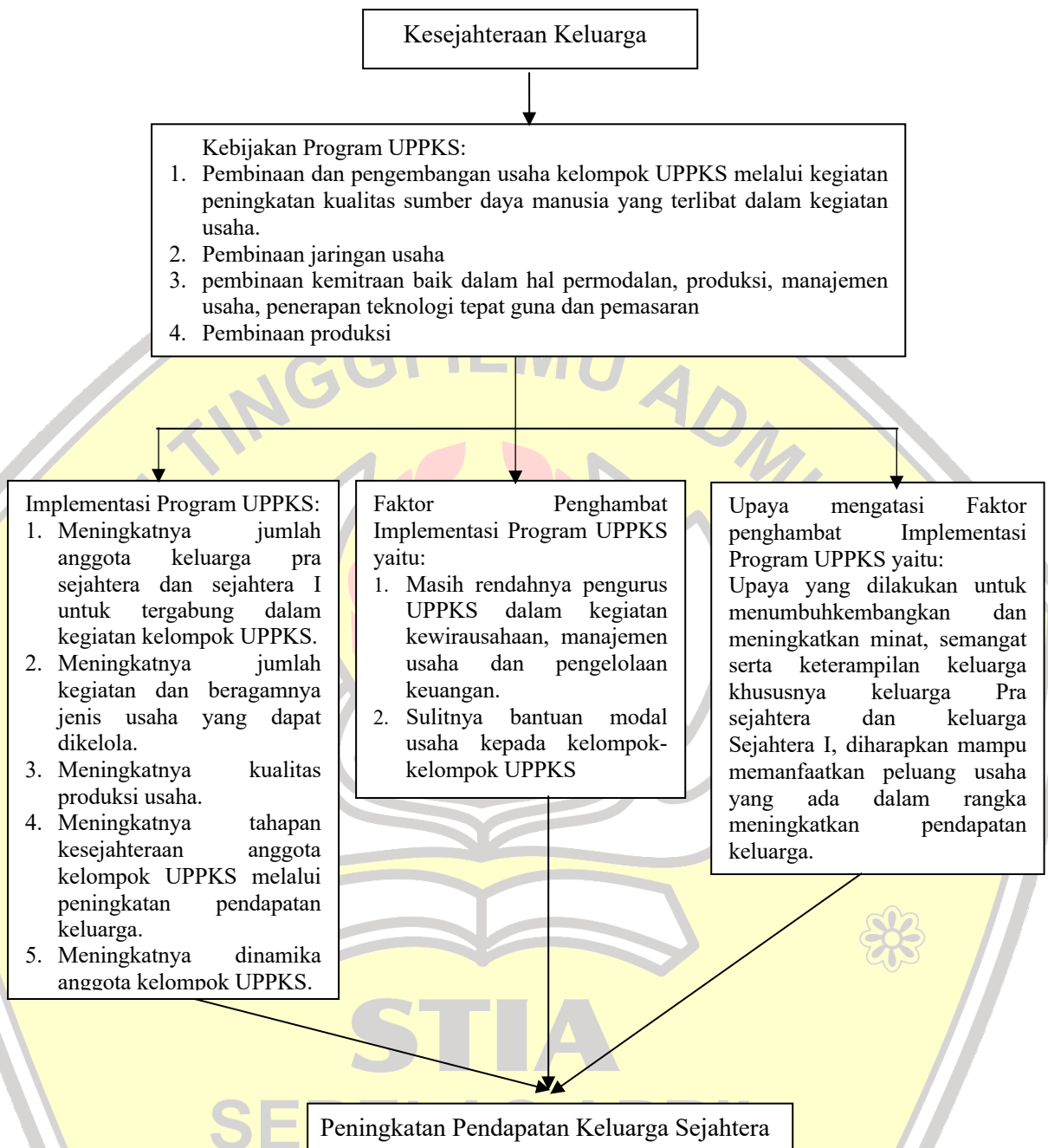
Upaya mengatasi Faktor penghambat Implementasi Kebijakan, Menurut

Aidan Everning (dalam Pasolong, 2010:59):

1. Logika Yang Digunakan Oleh Suatu Kebijakan
2. Hakikat Kerjasama Yang Dibutuhkan
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini:





Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2. Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti membuat kisi-kisi pertanyaan, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi untuk digunakan

sebagai bahan pengamatan penelitian secara langsung pada objek penelitian mengenai variabel penelitian yaitu Implementasi program yang disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.2
Kisi- Kisi Pertanyaan Penelitian

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kisi-Kisi Pertanyaan	No Item
Bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?	Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho (2004:162-163):		
	1. Implementasi strategi (pra implementasi)	a. Menyesuaikan struktur dan strategi	1
		b. Mengoperasionalkan strategi	2
	2. Pengorganisasian (organizing)	a. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan	3
		b. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia	4
	3. Penggerakan dan kepemimpinan	a. Motivasi	5
		b. Komunikasi organisasi	6
	4. Pengendalian	a. Desain pengendalian	7
		b. Pengendalian anggaran/keuangan	8
	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan, Menurut Sunggono (1994: 149-153):	
1. Isi Kebijakan		a. Pemahaman Isi Kebijakan	9
		b. Manfaat Kebijakan	10
		c. Sumber Daya	11
2. Informasi		a. Ketidak jelasan Informasi	12
		b. Sasaran Sosialisasi	13
3. Dukungan		a. Penyelenggara program	14
		b. Sasaran Program	15
4. Pembagian Potensi		a. Pembagian tugas yang jelas	16
		b. Tanggung Jawab	17
Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan	Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi		

pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang	Kebijakan, Menurut Aidan Everning (dalam Pasolong, 2010:59):		
	1. Logika Yang Digunakan Oleh Suatu Kebijakan	a. Kegiatan-kegiatan Kebijakan Program	18
		b. Tujuan dan Sasaran Program	19
		c. Pemanfaatan Kebijakan Program	20
	2. Hakikat Kerjasama Yang Dibutuhkan	a. Adanya Koordinasi	21
		b. Komunikasi	22
	3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Kemampuan Dalam Mengelola Kebijakan Program	23
		b. Komitmen Dalam Mengelola Kebijakan Program	24



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut pendekatan penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2017:9) mengemukakan definisi metode penelitian kualitatif yaitu:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan pendapat Moleong (2014:14) yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dan responden.
3. Metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut William (Moleong, 2011:5) metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:205), yaitu bahwa:

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan berkna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih “trendy”, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan Desain Penelitian dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Indikasi Masalah:

1. Masih rendahnya pengurus UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan, manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Hal ini dilihat dari, Kurangnya pengetahuan dalam mengolah bahan-bahan yang ada disekitar sehingga mereka kesusahan dalam membuat produk yang berkualitas sehingga mereka hanya bisa membuat produk yang sama dengan pedagang lain.
2. Kurang optimalnya Pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara berkelanjutan, sehingga Kelompok UPPKS belum terampil dalam menyesuaikan bidang usahanya dengan potensi daerah. Hal ini dapat dilihat pada saat pemberian pembinaan atau materi kepada kelompok, pihak instansi hanya memberikan substansi materi yang berkuat pada pelaporan dan pembukuan keuangan yang bersifat administratif saja.
3. Adanya kesulitan dalam perbantuan modal usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok UPPKS. Hal ini dilihat dari sulitnya proses pengajuan modal kepada pihak tertentu karena Salah satu persyaratan untuk memperoleh

Fokus Permasalahan:

1. Implementasi
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Program UPPKS
3. Upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Program UPPKS

Model teori yang digunakan Implementasi Kebijakan, Nugroho (2004:162-163)Sebagai berikut.:

1. Implementasi strategi (pra implementasi)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penggerakkan dan kepemimpinan
4. Pengendalian

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan, Menurut Sunggono (1994: 149-153):

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Upaya mengatasi Faktor penghambat Implementasi Kebijakan, Menurut Aidan Everning (dalam Pasolong, 2010:59):

1. Logika Yang Digunakan Oleh Suatu Kebijakan
2. Hakikat Kerjasama Yang Dibutuhkan
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Metodologi Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif

Penentuan sasaran informan penelitian adalah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang

Lokasi Penelitian Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara mendalam
 - c. Dokumentasi

Kesimpulan

Gambar 3.1
Bagan Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian. Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono (2017:223) menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradey yang dikutip Sugiyono (2017:215) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas DPPKB	1
2.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	1
3.	Kepala Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1
4.	Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	1
5.	Staf Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5
6.	Staf Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	4
Jumlah		13

Sumber: Hasil Penelitian 2021

2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017:218) “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Setelah mengetahui pendapat diatas dan mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya serta ilmu pengetahuan, maka yang dijadikan sasaran atau informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2
Sasaran Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	1
2.	Kepala Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1
3.	Staff Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2
Jumlah		4

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggung jawab terhadap program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

C. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang pelaksanaan Program UPPKS. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017:225).

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menurut Nasution (Sugiyono, 2017:226) menyatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.
2. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2017:231), mendefinisikan interview sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni,

yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:240).

D. Prosedur pengolahan dan analisis data

Pada jenis penelitian ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpul data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data. Pengolahan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penulis melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2017:247-52), yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer miini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

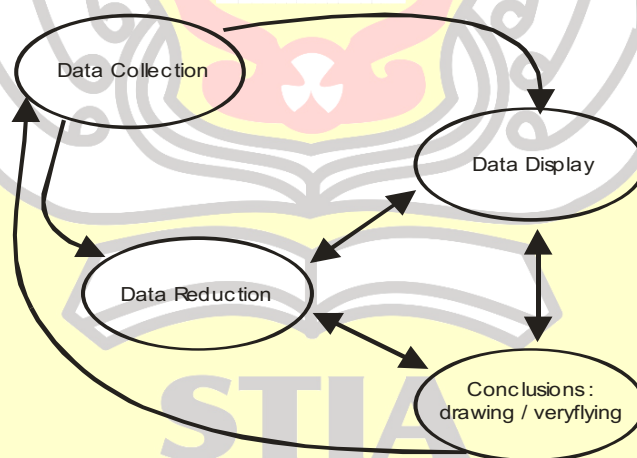
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka

data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis data digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Prosedur Pengolahan Data

E. Lokasi dan jadwal penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Program Bina Keluarga Remaja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya mengenai jadwal penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
1	Tahap Persiapan									
	a. Studi Kepustakaan									
	b. Observasi Awal									
	c. Pengajuan Judul									
	d. Pembuatan Proposal									
	e. Seminar Proposal									
2	Tahap Pelaksanaan dan Penyusunan									
	a. Pengumpulan Data									
	b. Pengolahan Data									
3	Tahap Pengujian									
	a. Sidang Skripsi									
	b. Perbaikan Sidang Skripsi									
	c. Publikasi									

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV (Empat) mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang. Selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi secara efektif dan efisien, akan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV yang meliputi implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan dan kepemimpinan, dan pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dimensi implementasi strategi (pra implementasi) dalam pelaksanaan program UPPKS dirasakan belum optimal hal tersebut dapat dilihat belum semua kelompok UPPKS diberikan pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh pihak penyelenggara program. Oleh karena itu, agar program UPPKS berjalan sesuai dengan perencanaan maka pihak dinas harus terus menerus memberikan pembinaan baik itu dalam kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang diberikan sehingga setiap kelompok mampu mengembangkan setiap usahanya.
- b. Berdasarkan dimensi pengorganisasian (*Organizing*) dalam dalam pelaksanaan program UPPKS dirasakan cukup optimal hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang mendukung yaitu prinsip pembagian kerja, pembagian kerja dalam program ini sudah diatur tanpa mengesampingkan tupoksinya masing-masing. Seperti UPT yang dibantu oleh setiap petugas di kecamatan dan desa. Akan tetapi dalam mengembangkan kapasitas SDM hal ini pengelola, dalam menjalankan program UPPKS ini belum semua kelompok diberikan pelatihan karena setiap kelompok yang akan diberikan pelatihan harus sudah memiliki produk agar bisa langsung menjalankan yang sudah ada tidak dari nol.
- c. Berdasarkan dimensi Penggerakan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan program UPPKS dirasakan sudah cukup optimal hal tersebut dapat dilihat dari adanya motivasi yang diberikan kepada sasaran program dengan diberikannya kepercayaan penuh, serta dorongan kepada kelompok UPPKS agar terus mengembangkan usahanya lebih baik dan lebih kreatif

dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mengurangi jumlah keluarga miskin. Kemudian adanya evaluasi kinerja setiap petugas untuk mengetahui perkembangan kelompok BKR tersebut

d. Berdasarkan dimensi pengendalian dalam pelaksanaan program UPPKS dirasakan belum cukup optimal hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang mendukung yaitu pengendalian anggaran atau keuangan. Dalam pelaksanaan program UPPKS ini dukungan anggaran yang diberikan masih minim karena program ini termasuk bagian dari program desa sehingga harus mengajukan terlebih dahulu kepada desa.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

a. Hambatan yang dihadapi dalam pemahaman Isi Kebijakan Program Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yaitu:

1. seperti dalam pemanfaatan kebijakan ini, yaitu kurangnya pembinaan yang diberikan, pemahaman yang kurang, ketersediaan SDM dalam mengikuti atau tergabung dalam kelompok UPPKS masih rendah sehingga realisasi dalam pemanfaatan kebijakan ini belum maksimal,
2. kualitas SDM yang masih kurang, karena pada dasarnya SDM merupakan pelaksana dari berbagai kegiatan.

3. Pemahaman dalam menjalankan program yang masih terbatas, dukungan anggaran dalam memberikan bantuan modal masih belum maksimal.
 - b. Hambatan yang dihadapi terkait dengan informasi yaitu belum cukup optimal dalam pemberian komunikasi yang disampaikan kepada sasaran program, seperti halnya penyebaran informasi yang terhambat dalam penggunaan waktu sehingga kelompok UPPKS merasa sulit dalam mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh penyelenggara program.
 - c. Hambatan yang dihadapi mengenai dukungan dan pihak penyelenggara memiliki hambatan yaitu Minimnya anggaran dalam pelaksanaan program UPPKS, Penyesuaian pihak penyelenggara dengan sasaran terkait pemberian pembinaan yang harus sesuai dengan adat istiadat setiap daerah.
 - d. Hambatan yang dihadapi pada dimensi pembagian potensi terjadi pada adanya ketidaksesuaian perencanaan kerja dengan pelaksanaan dilapangan. Seperti petugas UPTD, Petugas Kecamatan/Desa dengan sasaran program. sehingga dalam pelaksanaannya adanya kelompok yang merasa bingung dalam menjalin koordinasi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Bidang Keluarga Sejahtera

Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dimensi logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu dengan meningkatkan Kerjasama dengan berbagai pihak agar program ini dapat terealisasi dengan baik dan dapat mengurangi angka kemiskinan khususnya dapat menambah penghasilan bagi keluarga Pra-Ks, diberikan pembinaan secara merata kepada setiap kelompok UPPKS agar terus mengembangkan usaha yang dijalaninya.
- b. Upaya untuk mengatasi yaitu melakukan koordinasi yang baik dengan cara bekerjasama antara pihak penyelenggara dengan sasaran program melalui rapat dan koordinasi untuk mengevaluasi kegiatan, Pihak penyelenggara harus selalu berkoordinasi dengan pihak sasaran program ataupun pihak yang terlibat dalam program UPPKS ini, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan setiap kelompok UPPKS, Memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok UPPKS, Memberikan dukungan dari semua pihak terkait.
- c. Upaya yang dilakukan daam mengatasi dimensi ketersediaan sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan komitmen kerja dan kemampuan dari SDM sebagai pelaksana program UPPKS ini, mengadakan pelatihan-pelatihan baik kepada petugas maupun sasaran program.

B. Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan dalam mengimplementasikan program, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan kemampuan kelompok UPPKS diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan diberikannya pembinaan dan pelatihan yang sebaiknya juga rutin dilakukan untuk mengembangkan program tersebut. Bagi Pemerintah diharapkan komitmen dan perhatiannya untuk menyediakan dukungan anggaran dan mengupayakan tersedianya ruang kegiatan bagi kelompok UPPKS agar kegiatan dalam Program ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Setiap kelompok UPPKS harus senantiasa didampingi dan dibina secara terus menerus oleh petugas Kecamatan maupun desa yang berperan sebagai fasilitator. Pendampingan yang harus dilakukan yaitu seperti pembinaan jaringan kemitraan, pengembangan pemasaran hasil produksi, pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis usaha yang dijalani oleh setiap kelompok UPPKS sehingga pelaksanaan UPPKS sesuai dengan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Adanya sosialisasi bagi para pihak pengurus maupun anggota kelompok UPPKS agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta para kelompok

UPPKS paham akan maksud dan tujuan dibentuknya program UPPKS tersebut.

4. Pihak penyelenggara program harus terus memberikan inovasi seperti pembinaan yang dapat memberdayakan keluarga melalui pemberian informasi untuk menambah pengetahuan sebagai salah satu langkah untuk terus mengembangkan usaha ekonomi keluarga yang produktif dan hasil produksinya semakin meningkat.
5. Pihak penyelenggara program perlu meningkatkan setiap kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap kelompok UPPKS yang ada di setiap daerah secara berkala sebagai bahan masukan untuk perkembangan program UPPKS kedepannya agar semakin baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amirullah dan Budiyo, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hunger, David J. & Wheelen L. Thomas. 2009. *Manajemen Strategis*. Bandung: Andi Offset.
- Iskandar. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Lester, James P. & Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A. ., Agningsih, D. P. ., Aprilianti, D. N. ., Sutisna, E. ., & Yuliani, L. . (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 49-59. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapri1.ac.id/index.php/jrpa/article/view/52>
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- _____. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

- Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. (1994) *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwatno dan Juni Priansa D. 2016. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali pers.
- Winarno, Budi. (2014), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service).

B. Dokumen-dokumen:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Di Kabupaten Sumedang.
2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK.010/B5/2009 tentang pedoman pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
5. Rencana Strategis SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Periode 2018-2023.

6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 233/HK.010/F3/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengelola program aplikasi database kelompok UPPKS online.
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

